

**PERSEPSI KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL SIPATUO II
TERHADAP PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA
MATTIROTASI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**

**ACHMAD RIZAL
105951101520**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

**PERSEPSI KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL SIPATUO II
TERHADAP PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA
MATTIROTASI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**

**ACHMAD RIZAL
105951101520**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan
Strata Satu (S-1)**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Persepsi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sipatuo
II Terhadap Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa
Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

Nama : Achmad Rizal

NIM : 105951101520

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Disetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM.
NIDN : 0920018801


Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.
NIDN : 0908048802

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi


Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd.
NIDN: 0926036803


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN : 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Persepsi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sipatuo
II Terhadap Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa
Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

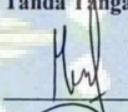
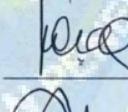
Nama : Achmad Rizal

NIM : 105951101520

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1 <u>Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM</u> Ketua Sidang	
2 <u>Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.</u> Sekretaris	
3 <u>Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM</u> Anggota	
4 <u>Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM</u> Anggota	

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap”** adalah benar merupakan hasil karya belum diajukan kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka dibagian terakhir skripsi ini.

Makassar, ★ Agustus 2024

Achmad Rizal

105951101520

ABSTRAK

ACHMAD RIZAL. Persepsi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sipatuo II di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Dibimbing oleh MUTHMAINNAH dan RAHMAT ARIANDI.

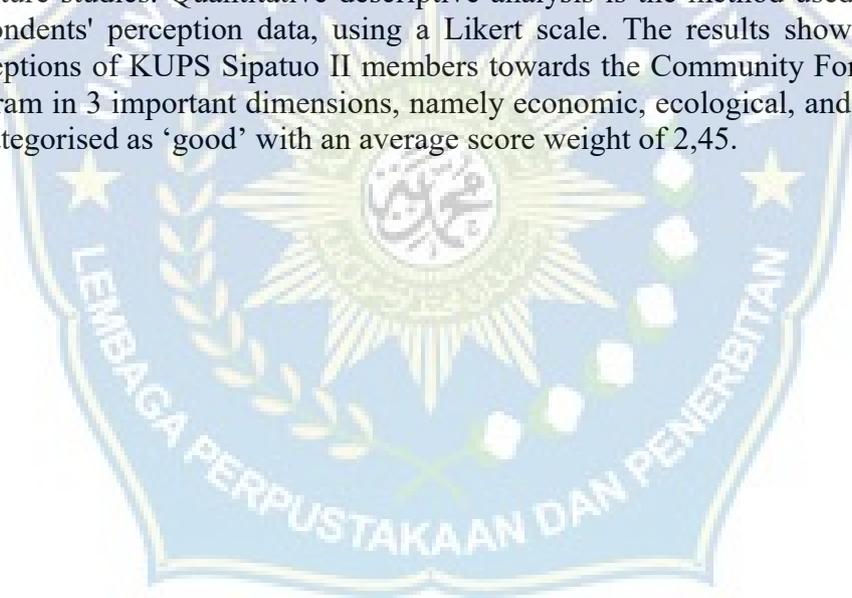
Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah hadirnya Program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sipatuo II yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap memiliki luas pengelolaan sebanyak 49,25 Ha yang saat ini dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sipatuo II. Untuk mengetahui efektifitas program HKM di wilayah Perhutanan Sosial diperlukan penelitian mengenai persepsi Kelompok Tani Hutan (KTH) dari segi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Adapun responden pada penelitian kali ini adalah anggota KUPS Sipatuo II sebanyak 35 responden yang ditentukan secara sensus. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 3 cara yaitu observasi, kuesioner, dan studi literatur. Analisis deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data persepsi responden, dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anggota KUPS Sipatuo II terhadap program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam 3 dimensi penting yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial dapat dikategorikan “baik” dengan bobot skor rata rata 2,45.



ABSTRACT

ACHMAD RIZAL. Perception of Social Forestry Business Group (KUPS) Sipatuo II in Mattirotasi Village, Watang Pulu Sub-district, Sidrap Regency. Supervised by MUTHMAINNAH and RAHMAT ARIANDI.

One of the community empowerment programmes implemented by the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) is the presence of the Social Forestry Programme through the Community Forest (HKm) scheme. Sipatuo II Community Forest (HKm) located in Mattirotasi Village, Watang Pulu District, Sidrap Regency has a management area of 49.25 Ha which is currently managed by the Sipatuo II Social Forestry Business Group (KUPS). To determine the effectiveness of the HKM programme in the Social Forestry area, research is needed on the perceptions of Forest Farmer Groups (FMGs) in terms of economic, ecological, and social aspects. The respondents in this study were members of KUPS Sipatuo II as many as 35 respondents determined by census. This research uses data collection methods in 3 ways, namely observation, questionnaires, and literature studies. Quantitative descriptive analysis is the method used to analyse respondents' perception data, using a Likert scale. The results showed that the perceptions of KUPS Sipatuo II members towards the Community Forest (HKm) program in 3 important dimensions, namely economic, ecological, and social, can be categorised as 'good' with an average score weight of 2,45.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proposal dengan judul **“Persepsi KUPS Sipatuo II Terhadap Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.”**

Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, beliau yang menjadi surih tauladan bagi kita ummat beragama. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, mengenai isi maupun penulisnya, sehingga penyusun memohon kritikan yang bersifat membangun. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua

Dengan segala kerendahan hati, tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada yang sebesar - besarnya kepada

1. Kedua orang tua tercinta, tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberhasilan dan keselamatan penulis dunia akhirat, kemudian dukungan moral serta materi demi keberhasilan pendidikan penulis
2. Dr. Ir. Hj. Andi Khaeriyah., M. Pd selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S. Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan masukan kepada penulis

4. Ir. Muthmainnah, S. Hut., M. Hut., IPM selaku Dosen Pembimbing I dan Rahmat Ariandi, S,Hut., M.Hut., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.

Makassar, 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN KOMISI PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Persepsi Masyarakat.....	4
2.2. Hutan Kemasyarakatan dan Pengelolaannya	5
2.3. Program Perhutanan Sosial	7
2.4. Kerangka Berpikir	9
III. METODE PENELITIAN	11
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	11

3.2.	Teknik Penentuan Sampel.....	11
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.4.	Jenis Data	12
3.5.	Analisis Data	13
3.6.	Skala Pengukuran.....	13
3.7.	Definisi Operasional.....	15
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1.	Keadaan Umum dan Lokasi	17
4.2.	Karakteristik Responden	18
4.3.	Persepsi Anggota KUPS SIPATUO II terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.....	20
4.4.	Persepsi Anggota KUPS Sipatuo II terhadap Keseimbangan Ekologi Lingkungan	21
4.5.	Persepsi Anggota KUPS Sipatuo II terhadap aspek Sosial pada Program Hutan Kemasyarakatan.....	23
4.6.	Rekapitulasi Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Program Hutan Kemasyarakatan	26
V.	PENUTUP.....	29
5.1.	Kesimpulan	29
5.2.	Saran.....	29
	DAFTAR PUSTAKA.....	30
	LAMPIRAN.....	32

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir	10
2.	Peta dan Sketsa Areal Kerja KTH Sipatuo II	17



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Skala Likert Skala Sikap Masyarakat	14
2.	Skala Likert Kategori Sikap Masyarakat	15
3.	Umur Responden	18
4.	Tingkat Pendidikan Responden	19
5.	Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Keseimbangan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	20
6.	Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Keseimbangan Ekologi Lingkungan.....	22
7.	Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Aspek Sosial pada Program Hutan Kemasyarakatan	23
8.	Rekapitulasi Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Program Perhutanan Sosial.....	25
9.	Rekapitulasi Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap 3 Aspek Program Perhutanan Sosial.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian	32
2.	Hasil Olah Data Skala Likert	35
3.	Surat Keputusan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Sipatuo II Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu.....	37
4.	Surat Keputusan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Sipatuo II Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu	42
5.	Dokumentasi Pengisian Kuesioner dan Wawancara Anggota KUPS Sipatuo II.....	44
6.	Dokumentasi Kawasan Hutan Masyarakat Yang dikelola KUPS Sipatuo II.....	45
7.	Dokumentasi Hasil Olahan Produk KUPS Sipatuo II.....	46

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya (PERMEN LHK No. P9 Tahun 2021). Perhutanan sosial merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di sekitar kawasan hutan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengelolaan kawasan hutan secara seimbang antara peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan (Sood, M., 2021).

Salah satu skema dari perhutanan sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-li/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan Ekonomi, (Huzaini, et al., 2023).

Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap terdapat aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan dan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan pada areal Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kelompok masyarakat tersebut tergabung dalam kelompok tani hutan yang diberi nama Kelompok Tani Hutan Sipatuo II yang memiliki anggota sebanyak 35 orang dan memiliki hak kelola ijin selama 35 tahun di hutan kemasyarakatan atau yang dikenal HKm Sipatuo II dengan seluas 49,25 Ha.

Sampai saat ini, banyak penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan berbagai program perhutanan sosial, namun implementasinya di lapangan masih terbatas. Kelompok tani yang sudah mengelola kawasan hutan sudah memahami apa itu program perhutanan sosial, namun masih di perlukan persepsi mereka. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya maka itu persepsi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kelompok tani memandang program perhutanan sosial, (Aam, A., 2023). Maka persepsi Anggota KTH Sipatuo II penting diteliti untuk mengetahui tingkat persepsi dan juga menilai bagaimana pengetahuan, penilaian, serta pemanfaatan dari masyarakat kelompok tani hutan Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu semoga kedepannya bisa dilakukan perbaikan dan penanganan yang tepat bagi anggota KUPS Sipatuo II.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat KUPS Sipatuo II terhadap program perhutanan sosial di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat KUPS Sipatuo II terhadap program perhutanan sosial di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu:

1. Memberikan informasi tentang persepsi masyarakat KUPS Sipatuo II terhadap pengelolaan perhutanan sosial di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
2. Sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian tentang persepsi masyarakat KUPS Sipatuo II terhadap program perhutanan sosial di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Abdurahman et al., 2022).

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang adadalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Mauludin, et al., (2022).

Terdapat 2 faktor yang berpengaruh pada persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dimana faktor internal adalah perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Dan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan di mana persepsi itu berlangsung (Pohan, N., 2021).

2.2. Hutan Kemasyarakatan dan Pengelolaannya

Hutan kemasyarakatan adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi, yang beranggotakan masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. Persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan dalam bentuk surat keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang (Sabar, et al., 2022).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan milik negara yang pemanfaatannya difokuskan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan merata melalui pengembangan kapasitas serta pemberian akses, dengan maksud akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Safe'i, et al, 2018).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/2016 tentang Perhutanan Sosial, Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan skema perhutanan sosial yang berada di hutan negara dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Menurut Novasari, et al., (2020), Hutan Kemasyarakatan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju deforestasi dengan melibatkan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara

optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Haikal, et al. (2020) juga mengemukakan bahwa Hutan Kemasyarakatan bertujuan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan tujuan utama untuk memberdayakan mereka dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberian hak akses dan pengembangan kapasitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari hutan secara optimal dan merata (Habibatul, U., 2021).

Pengelolaan hutan kemasyarakatan memiliki prinsip untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dengan pengelolaan yang lestari. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menekankan pada peran aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat yang hidup di sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung terhadap kelestarian hutan, (Haikal, et al., 2020).

Dalam pengelolaan HKm dibutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm itu sendiri, karena pengelolaan HKm yang dilakukan secara personal akan berbeda dengan

pengelolaan secara kelompok. Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat pengelola lahan HKm dalam kelembagaan dapat memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola lahan HKm. Dampak tersebut dapat dilihat dari kondisi tutupan lahan HKm sebelum dan sesudah adanya program HKm di wilayah tersebut, keberhasilan masyarakat dalam mengelola lahan HKm dapat dilihat juga dari adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat (Safe'iet al., 2018).

Adapun kriteria kawasan HKm sesuai Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yakni:

- a) Hutan Lindung dan Hutan Produksi: Areal yang dapat diberikan untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan kawasan hutan
- b) Pengelolaan oleh Masyarakat: Areal yang sudah dikelola oleh masyarakat dapat diberikan persetujuan HKm, dengan syarat bahwa masyarakat tersebut telah membentuk kelompok dan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan selama 5 tahun secara terus menerus.

2.3. Program Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HKm, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan Hutan (Peraturan Menteri LHK Nomor, 2016).

Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara. HKm dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat (Dewi, et al., 2018).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat atau benefit kepada masyarakat pengelola dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil kayu, pemanfaatan hasil bukan kayu dengan tetap terjaganya fungsi kawasan hutan) (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2020).

Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial (PS). Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan menteri sebelumnya yang mengatur masing-masing skema perhutanan sosial secara terpisah. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek Produksi/Ekonomi, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan;

- 2) Aspek Ekologis, yaitu terwujudnya pemanfaatan hutan yang tidak merusak dan mengganggu ekosistem dan lingkungan;
- 3) Aspek Sosial, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat pemegang ijin/hak kelola menuju pada kesadaran kelestarian fungsi hutan serta pemanfaatan hutan yang berkontribusi kepada pembangunan.

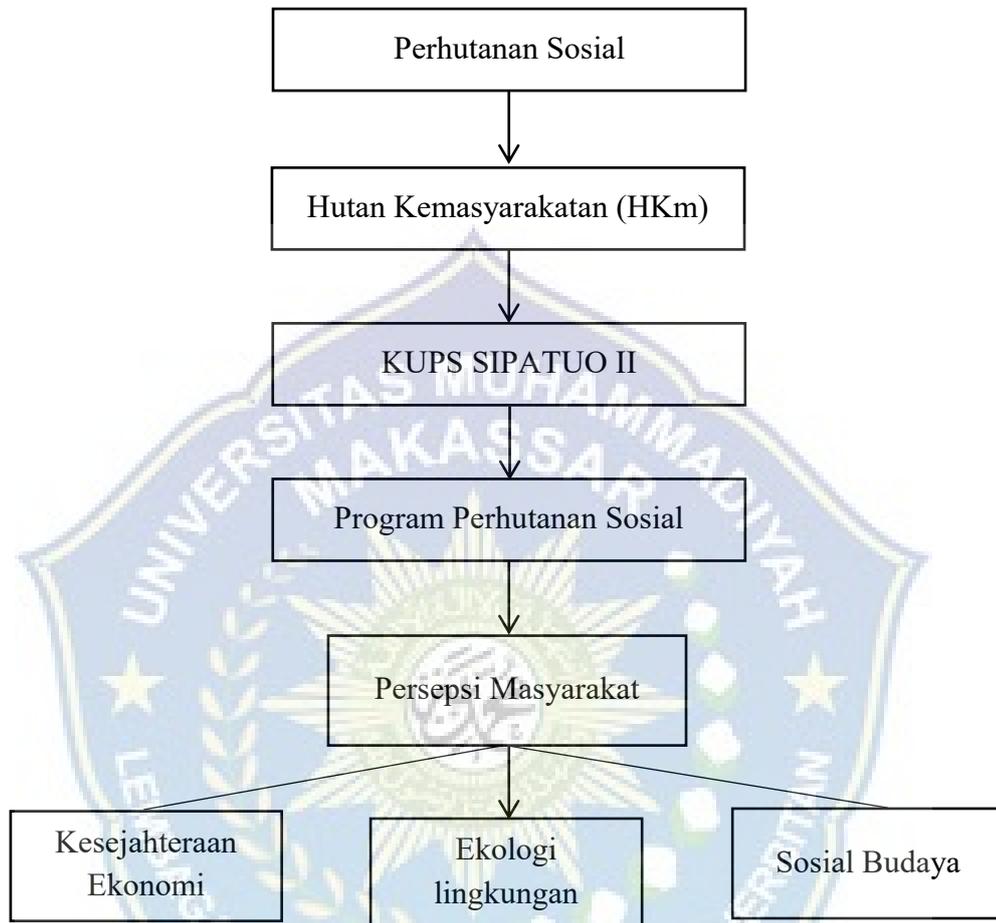
2.4. Kerangka Pikir

Perhutanan Sosial adalah program yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat, untuk mengelola hutan yang berada di kawasan hutan negara maupun hutan hak milik. Terdapat beberapa skema dalam Perhutanan Sosial, salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), di mana masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aspek ekonomi), keseimbangan lingkungan (aspek ekologi), dan dinamika sosial budaya (aspek sosial).

Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, tempat di mana Kelompok Tani Sipatuo II beroperasi, merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan hak pengelolaan melalui program Hutan Kemasyarakatan. Persepsi masyarakat dalam kelompok tani ini terhadap program yang diimplementasikan sangat penting, karena persepsi tersebut akan mempengaruhi tingkat partisipasi, keberlanjutan, serta dampak dari program tersebut terhadap kesejahteraan mereka.

Berdasarkan uraian pada kerangka teoritis melalui penelitian ini akan diungkapkan persepsi kelompok tani hutan Desa Mattirotasi Kecamatan Watang

Pulu Kabupaten Sidrap. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan, di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2024.

3.2. Teknik Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* dapat diartikan sebagai pengambilan sampel berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu masyarakat KUPS Sipatuo II di Desa Mattirotasi yang terlibat langsung pada program perhutanan sosial pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan jumlah responden sebanyak 35 anggota KUPS Sipatuo II selaku yang mengelola ijin kawasan hutan kemasyarakatan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti adalah masyarakat yang terlibat dalam program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu.

- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang dijawab responden, disusun secara sistematis sehingga dapat berfungsi dalam penelitian.
- c. Studi literatur, teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian.

3.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan kawasan dengan responden yang terlibat langsung dalam pelestarian hutan kemasyarakatan.

Data primer terdiri atas:

- 1) Karakteristik responden meliputi nama, umur, pendidikan jumlah anggota keluarga dan mata pencaharian.
- 2) Persepsi masyarakat.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan sebelumnya, kantor desa dan kecamatan serta instansi-instansi terkait, seperti dinas kehutanan dan pusat statistik untuk memperoleh informasi seperti data sosial, ekonomi, penduduk, keadaan umum lokasi, dan potensi hutan.

3.5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat generalisasi atau mengambil kesimpulan inferensial. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari data dalam penelitian, seperti distribusi data penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh, baik melalui hasil kuesioner dan wawancara, kemudian dideskripsikan dengan cara menggunakan analisis distribusi persentase untuk menghitung persentase dari setiap jawaban yang diberikan responden.

3.6. Skala Pengukuran

Karena adanya perbedaan jumlah skala yang digunakan, maka terlebih dahulu skala tersebut disamakan dengan cara mempergunakan analisis sikap skala likert, untuk analisis skala likert ini didasarkan klasifikasi data yaitu dengan skala sikap, skor, dan kategori.

Skala likert ini merupakan alat untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Keadaan yang sangat positif ke jenjang yang sangat negatif, untuk mengetahui sejauh mana tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti (Ridwan, 2015).

Skala likert ini disebut sebagai *Summated Method* penggunaan *Summated Rantings Method* akan ditentukan pada skor pengukuran skala likert yaitu pemberian skor tertinggi dan terendah dari masing-masing jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Penelitian ini akan ditentukan skor tertinggi jawaban, pertanyaan akan diajukan kepada masyarakat adalah sebesar 3, sedangkan untuk skor jawaban terendah adalah 1. Jawaban diantara kedua skala tersebut disesuaikan dengan jumlah jawaban yang ada. Untuk skala pertanyaan yang menjawab sangat baik diberi nilai 3, baik diberi nilai 2, dan yang memberi jawaban tidak baik diberi nilai 1.

Untuk mendapatkan pemeringkatan persepsi masyarakat, total nilai maksimal 3 dan minimum 1. Selanjutnya nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat peringkat dengan skala penilaian sebagai berikut.

Untuk persepsi masyarakat

$$\text{Selisih per kategori} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

$$\text{Selisih per kategori} = \frac{3-1}{3}$$

$$\text{Selisih per kategori} = 0,67$$

Berdasarkan rumus diatas, dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1. Skala Likert Skala Sikap Masyarakat

Skala Sikap Masyarakat		
No	Sikap	Skor
1.	Sangat Setuju	3

Skala Sikap Masyarakat		
No	Sikap	Skor
2.	Setuju	2
3.	Tidak Setuju	1

Sumber: Hasil modifikasi skala likert

Cara untuk mendapatkan:

$$\text{Total skor rata-rata} = \frac{\text{jumlah total skor keseluruhan responden}}{\text{jumlah responden}}$$

Tabel 2. Skala Likert Kategori Sikap Masyarakat

Kategori Sikap Masyarakat		
No	Kategori	Skor
1.	Sangat Baik	2,36 – 3
2.	Baik	1,68 – 2,35
3.	Tidak Baik	1 – 1,67

Sumber: Hasil modifikasi skala likert

Cara untuk mendapatkan:

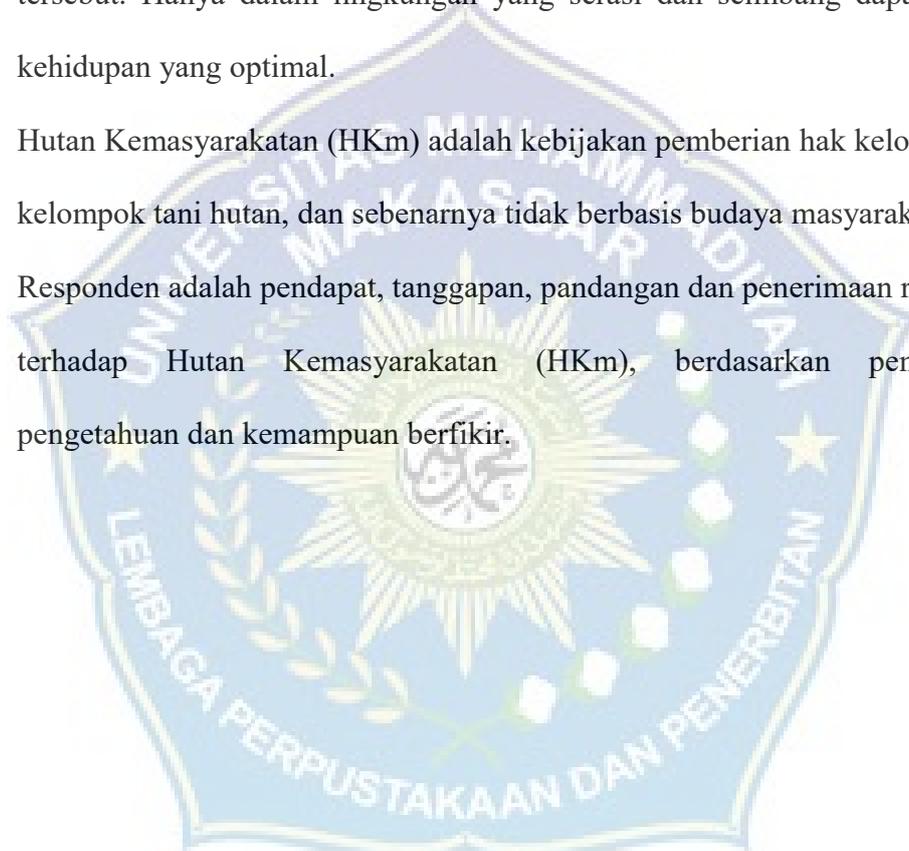
$$\text{Kategori} = \frac{\text{jumlah total rata-rata}}{\text{jumlah pertanyaan}}$$

3.7. Definisi Operasional

Batasan-batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa istilah:

1. Persepsi adalah tanggapan masyarakat di sekitar Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, yang diharapkan memberikan persepsi yang baik untuk mendukung program perhutanan sosial skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan kemasyarakatan Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.
3. Pelestarian adalah tercapainya kemampuan fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.
4. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kebijakan pemberian hak kelola kepada kelompok tani hutan, dan sebenarnya tidak berbasis budaya masyarakat.
5. Responden adalah pendapat, tanggapan, pandangan dan penerimaan responden terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm), berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan berfikir.

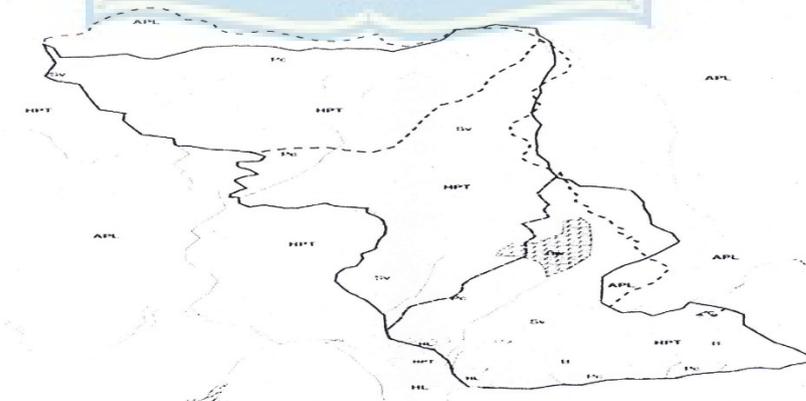


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum dan Lokasi

4.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Desa Mattirotasi merupakan desa yang berada di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Mattirotasi secara Geografis terletak diantara $30^{\circ}43'$ - $40^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}041'$ - $120^{\circ}010'$ Bujur Timur. Salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dengan luas wilayah 3406 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :



Gambar 2. Peta dan Sketsa Areal Kerja KTH Sipatuo II

Adapun jarak Desa Mattirotasi dari Ibu Kota Provinsi $\pm 162,2$ Km dengan jarak tempuh 3-4 jam dengan menggunakan kendaraan umum. Jarak Desa Mattirotasi terletak ± 15 Km dari Ibu Kota Sidrap dengan jarak tempuh motor 15-20 menit (Profil Desa Mattirotasi, 2021).

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, tingkat Pendidikan dan Karakteristik respon dapat mendeskripsikan keadaan sosial anggota KUPS Sipatuo II yang mengelola kawasan hutan yaitu Hutan Kemasyarakatan HKM di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

4.2.1 Karakteristik Sebaran Umur Responden

Umur seseorang biasanya menentukan kemampuannya dalam melakukan aktifitas serta kematangan dalam perbuatan (Tindakan). Kelompok umur 15 – 64 tahun digolongkan sebagai kelompok masyarakat yang produktif untuk bekerja sebab dalam rentan usia tersebut dianggap mampu untuk menghasilkan barang dan jasa. Umur yang produktif merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam kegiatan berusaha tani, (Gusti, et al., 2021). Berikut ini adalah sebaran umur responden anggota KUPS Sipatuo II di sekitar kawasan hutan kemasyarakatan pada Tabel 3.

Tabel 3. Umur Responden

No	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	25 - 64	29	82,86
2	65 - 75	6	17,14
Total		35	100,00

Sumber : Data Primer, 2024 (Kelas Umur Produktif)

Berdasarkan Tabel 3 dari 35 responden persentase sebaran umur produktif responden Sipatuo II adalah di umur 25 sampai 64 Tahun, sedangkan pada umur tidak produktif terdapat pada umur 65 – 75 Tahun.

4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden

Menurut Juliansyah dan Riyono (2018), Pendidikan akan menunjang cara berpikir dan berperilaku seseorang dalam mengambil keputusan maupun melakukan tindakan. Pendidikan akan menambah pengetahuan menjadi lebih luas sehingga lebih mampu mengembangkan ide ide yang ada. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pun dapat dicapai melalui Pendidikan (Jatiningrum, 2000). Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	6	17,14
2	SD/Sederajat	14	40,00
3	SMP/Sederajat	9	25,71
4	SMA/Sederajat	3	8,57
5	S1	3	8,57
Total		35	100,00

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 4 menjelaskan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah atau persentase sebesar 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki mayoritas responden masih rendah karena masih terdapat sebanyak 6 orang atau sebesar 17,14% yang tidak bersekolah.

4.3 Persepsi Anggota KUPS Sipatuo II Terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Masyarakat

KUPS Sipatuo II di Desa Mattirotasi adalah bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperluas program perhutanan sosial di Indonesia. Penetapan KUPS ini dilakukan untuk memberikan akses dan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan, menyediakan pelatihan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis hutan. Berikut disajikan persepsi Anggota KUPS Sipatuo II terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setelah menerima hak ijin kelola hutan kemasyarakatan.

Tabel 5. Persepsi KUPS Sipatuo II Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

No	Item	Kategori Sikap			Total	Rata Rata
		Sangat Setuju (3)	Setuju (2)	Tidak Setuju (1)		
1	Pemasaran Komoditi pada Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap	84	14	0	98	2,80
2	Fasilitas Bantuan Alat Ekonomi Produktif yang diberikan Program Perhutanan Sosial	72	22	0	94	2,69
3	Manfaat yang diberikan oleh program Hutan Kemasyarakatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan	33	48	0	81	2,31

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa dari 35 orang yang menjawab pertanyaan pada kolom kolom diatas menjelaskan, masyarakat sangat mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung inisiatif tersebut, yang mungkin diakibatkan oleh manfaat langsung yang dirasakan, seperti peningkatan pendapatan, pelestarian lingkungan dan penguatan komunitas. Respon positif ini juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan program, serta kepercayaan mereka terhadap pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Namun beberapa responden memiliki pandangan mengenai efektivitas dalam manfaat yang diberikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa meskipun ada potensi manfaat, implementasi program pemerintah seringkali kurang optimal.

4.4 Persepsi Anggota KUPS SIPATUO II terhadap Keseimbangan Ekologi Lingkungan

Program perhutanan sosial berfokus pada pengelolaan dan pemulihan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan ekologi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara pendekatan dan berfokus pada partisipasi masyarakat, program perhutanan sosial di KUPS Sipatuo II dapat membantu memulihkan dan menjaga keseimbangan ekologi di kawasan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka persepsi KUPS Sipatuo II terhadap keseimbangan ekologi lingkungan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6. Persepsi KUPS Sipatuo II Terhadap Keseimbangan Ekologi Lingkungan

No	Item	Kategori Sikap			Total	Rata Rata
		Sangat Setuju (3)	Setuju (2)	Tidak Setuju (1)		
1	Dampak program hutan kemasyarakatan dalam membantu menjaga kelestarian hutan pada kawasan yang dikelola	45	38	1	84	2,40
2	Akses yang lebih baik kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam	36	46	0	82	2,34
3	Dengan program hutan kemasyarakatan Kups Sipatuo II dapat meningkatkan produktivitas lahan hutan	33	48	0	81	2,31

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa KUPS Sipatuo II yang mengelola hutan kemasyarakatan di Desa Mattirotasi menyatakan setuju dengan keseimbangan ekologi yang terjadi pada kawasan hutan yang mereka kelola. Anggota KTH Sipatuo II memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan, seperti melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, yang meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan. Adanya penurunan angka deforestasi, anggota KTH Sipatuo II lebih termotivasi untuk menjaga hutan demi keberlanjutan sumber daya yang mereka andalkan dan berfokus pada menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Dengan ini secara keseluruhan, anggota KTH Sipatuo II cenderung setuju bahwa program perhutanan sosial melalui skema hutan kemasyarakatan bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, tetapi juga dalam usaha menjaga kelestarian hutan.

4.5 Persepsi Anggota KUPS Sipatuo II terhadap aspek Sosial pada Program Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial adalah inisiatif yang menggabungkan pengelolaan hutan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, program ini tidak hanya fokus pada konservasi lingkungan, tetapi juga dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Keberhasilan program ini bergantung pada pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Maka persepsi masyarakat terhadap aspek sosial pada program perhutanan sosial dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap Aspek Sosial pada Program Hutan Kemasyarakatan

No	Item	Kategori Sikap			Total	Rata Rata
		Sangat Setuju (3)	Setuju (2)	Tidak Setuju (1)		
1	Program PS dalam membantu mengatasi konflik antara masyarakat dan pemerintah	12	52	5	69	1,97
2	Hak ijin kelola selama 35 Tahun di Hutan Kemasyarakatan membantu lingkungan lestari pada masyarakat	90	10	0	100	2,86

No	Item	Kategori Sikap			Total	Rata Rata
		Sangat Setuju (3)	Setuju (2)	Tidak Setuju (1)		
3	Persepsi tentang sosialisasi yang diberikan dan pengaruh pada anggota KUPS Sipatuo II	45	40	0	85	2,43

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa dari jumlah 35 responden persepsi tentang aspek sosial pada program hutan kemasyarakatan, maka hasil yang didapat menyatakan pendapat yang beragam dalam membantu mengatasi konflik antara masyarakat dan pemerintah, Hak Ijin Kelola dan mengerti dalam menjangkau amanah program perhutanan sosial.

Masyarakat merasa setuju dengan pemberian akses pada lokasi kawasan hutan yang mereka kelola dan dengan adanya sosialisasi tentang program perhutanan sosial dan akses fasilitas yang diberi berupa Alat Ekonomi Produktif (AEP) untuk mengelola hasil bumi yang mereka kelola pada kawasan hutan, anggota KTH Sipatuo II berfokus pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan, program ini berkontribusi pada pelestarian lingkungannya yang menguntungkan pihak dari KTH Sipatuo II dalam mengelola kawasan hutan. Sedangkan beberapa lainnya merasa kurang setuju pada implementasi yang tidak konsisten yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dengan manfaat yang dijanjikan, dan juga ketidakadilan dalam distribusi manfaat yang menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik internal pada KTH Sipatuo II.

4.6 Rekapitulasi Persepsi KUPS Sipatuo II Terhadap Program Hutan

Kemasyarakatan

Berikut rekapitulasi dari hasil persepsi kelompok tani hutan Sipatuo II yang menunjukkan beragam persepsi terhadap program perhutanan sosial melalui skema hutan kemasyarakatan. Yang dilaksanakan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Hasil rekapitulasi persepsi ini mencakup tiga aspek utama, ekonomi, ekologi, dan sosial yang dimana dapat di lihat pada Tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Rekapitulasi Persepsi KUPS Sipatuo II Terhadap Program Perhutanan Sosial

NO	Kategori Ekonomi	Skor	Rata rata
1	Persepsi tentang adanya skema Hutan Kemasyarakatan pada Program perhutanan sosial	98	2,8
2	Persepsi tentang fasilitas yang diberikan dari Program PS dalam membantu perkembangan KUPS Sipatuo II	94	2,69
3	Persepsi program PS membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat	81	2,31
Jumlah		273	7,8
NO	Kategori Ekologi	Skor	Rata Rata
1	Persepsi Dampak program PS membantu menjaga kelestarian hutan yang dikelola oleh anggota KTH Sipatuo II	84	2,4
2	Persepsi dalam memberikan akses dalam pengelolaan sumber daya hutan	82	2,34
3	Persepsi program PS dapat meningkatkan produktivitas hutan	81	2,31
Jumlah		247	7,05
NO	Kategori Sosial	Skor	Rata Rata
1	Persepsi program PS membantu mengatasi konflik disekitar kawasan hutan	69	1,97

NO	Kategori Sosial	Skor	Rata Rata
2	Persepsi hak kelola ijin di hutan kemasyarakatan	100	2,86
3	Persepsi tentang sosialisasi dan pengaruh pada anggota KUPS Sipatuo II	85	2,43
Jumlah		254	7,26

Sumber : Data Primer, 2024

Dari rekapitulasi persepsi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sipatuo II terhadap program perhutanan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan. Pada tabel 8 terdapat jumlah keseluruhan nilai skor dan rata rata persepsi anggota Kelompok Tani Hutan Sipatuo II, dimana anggota Kelompok Tani Hutan memberikan gambaran dari 3 aspek yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Ekologi, dan Aspek Sosial dan dijabarkan sebagai berikut.

1. Ekonomi

Dari aspek ekonomi memiliki total skor 273 dan total rata rata 7,8. Program Perhutanan Sosial memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui pemasaran komoditi, bantuan alat ekonomi produktif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan pemasaran dan memfasilitasi alat ekonomi produktif, program ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi.

2. Ekologi

Sedangkan aspek ekologi memiliki total skor 247 dan total rata rata 7,5 yang dimana skor tersebut mempengaruhi persepsi KUPS Sipatuo II

terhadap hutan kemasyarakatan. Dampak dari Program Perhutanan Sosial memiliki dampak ekologi yang signifikan melalui persepsi masyarakat mengenai kelestarian hutan, akses pengelolaan sumber daya, dan peningkatan produktivitas hutan.

3. Sosial

Aspek sosial memiliki perolehan skor 254 dan total rata-rata 7,26. Dengan secara keseluruhan, Program Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan memiliki dampak sosial yang signifikan melalui persepsi masyarakat mengenai pengurangan konflik, kejelasan hak kelola, dan efektivitas sosialisasi. Program ini tidak hanya membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Berikut total jumlah keseluruhan skor pada aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi Persepsi KUPS Sipatuo II terhadap 3 aspek

No	Kategori	Total	Rata Rata
1	Ekonomi	273	7,8
2	Ekologi	247	7,05
3	Sosial	254	7,26
4	Jumlah Total	774	22,11
Jumlah Total Rata Rata			2,45

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 10. Jika di jumlahkan semua yaitu aspek ekonomi, ekologi dan sosial maka penjumlahan rata-ratanya adalah 22,11 dan jumlah total rata-rata yang digabungkan dari 3 aspek tersebut ialah 2,45.

Dari tabel rekapitulasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUPS Sipatuo II, yang mengelola kawasan hutan kemasyarakatan lewat program perhutanan sosial, memiliki kinerja yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan program dengan kategori baik dengan bobot skor rata rata 2,45.



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap persepsi masyarakat yang mengelola pada hutan kemasyarakatan, maka dapat dilihat melalui perihal aspek ekonomi, ekologi dan sosial menyimpulkan bahwa, persepsi KUPS Sipatuo II terhadap program perhutanan sosial di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, dengan keseluruhan nilai rata rata adalah 22,11 dengan nilai kategori yaitu 2,45. Dengan ini bahwasannya Kups Sipatuo II yang mengelola pada kawasan hutan kemasyarakatan melalui program perhutanan sosial masuk dalam kategori sikap sangat baik.

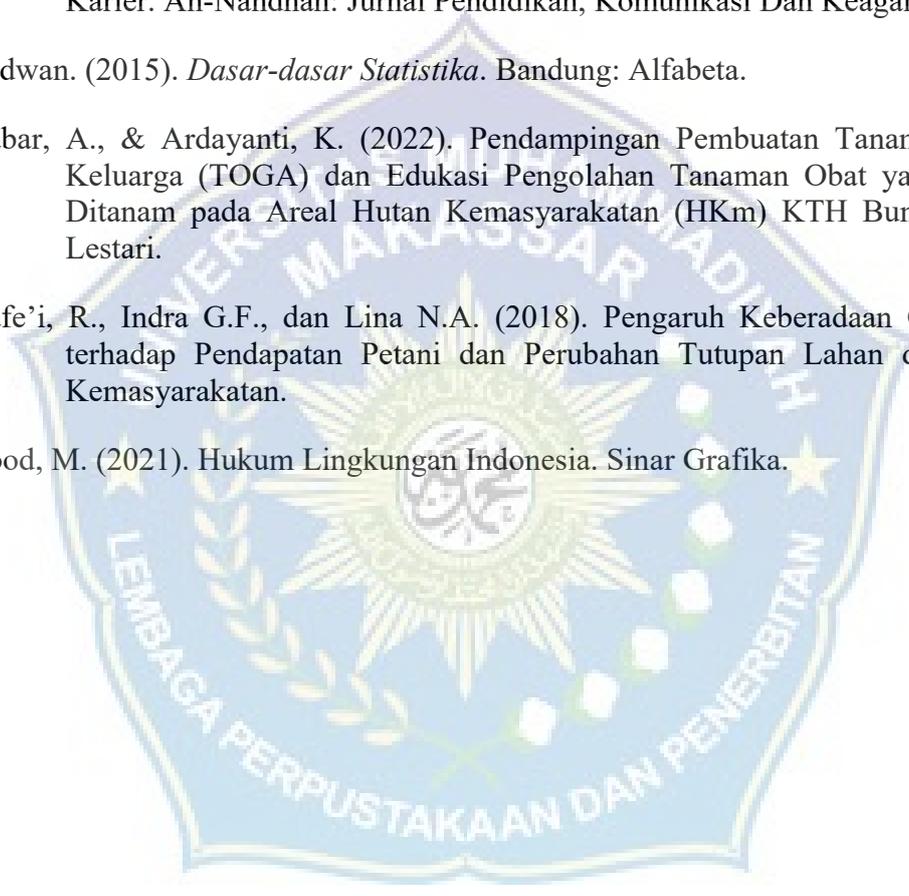
5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal dalam rangka kegiatan di hutan kemasyarakatan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Sidrap terkhusus KPH Bila dan BPSKL Sulawesi yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan pengontrol, dapat memberikan arahan arahan dan petunjuk mengenai hutan kemasyarakatan yang bersifat berkelanjutan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan yang ada di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam, A. (2023). PEMBERDAYAAN Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok Di Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan Lampung Selatan (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Abdurahman, H., & Sari, Y. D. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. *Jurismata*.
- Dewi, I.N., San A.A., Wahyu A., dan Priyono S. (2018). Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKM) Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2020). *Panduan Hutan Kemasyarakatan (HKM)*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Gusti, I. M., Gayatri, S., & Prasetyo, A. S. (2021). Pengaruh umur, tingkat pendidikan dan lama bertani terhadap pengetahuan petani tentang manfaat dan cara penggunaan kartu tani di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. DOI: <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.926>
- Habibatul, U. (2021). PEMBERDAYAAN Masyarakat Berbasis Hutan Kemasyarakatan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Haikal, F.F., Rahmat S., Hari K., dan Arief D. (2020). Pentingnya Pemantauan Kesehatan Hutan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- Huzaini, M., Jufri, A., & Arkandia, D. (2023). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Dilihat Dari Perspektif Islam Di Kawasan Hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7907>
- Kagungan, D. (2012). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
- Kartono, K., & Gulo, D. (1987). *Kamus Psikologi*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Mauludin, M. S., Ratnawati, D., Arianti, N., Pryastara, M. D., & Novitawati, V. A. (2022). Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Gojek. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*
- Novasari, D., Rommy Q., dan Duryat. (2020). Keragaman Jenis Tanaman pada Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 88 Tentang Perhutanan Sosial Tahun 2014
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Perhutanan Sosial Tahun 2021
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tentang Perhutanan Sosial Tahun 2016
- Pohan, N. (2021). Persepsi Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Terhadap Karier. *An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Keagamaan*.
- Ridwan. (2015). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sabar, A., & Ardayanti, K. (2022). Pendampingan Pembuatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Edukasi Pengolahan Tanaman Obat yang Telah Ditanam pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Buntu Lumu Lestari.
- Safe'i, R., Indra G.F., dan Lina N.A. (2018). Pengaruh Keberadaan Gapoktan terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutam Kemasyarakatan.
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.

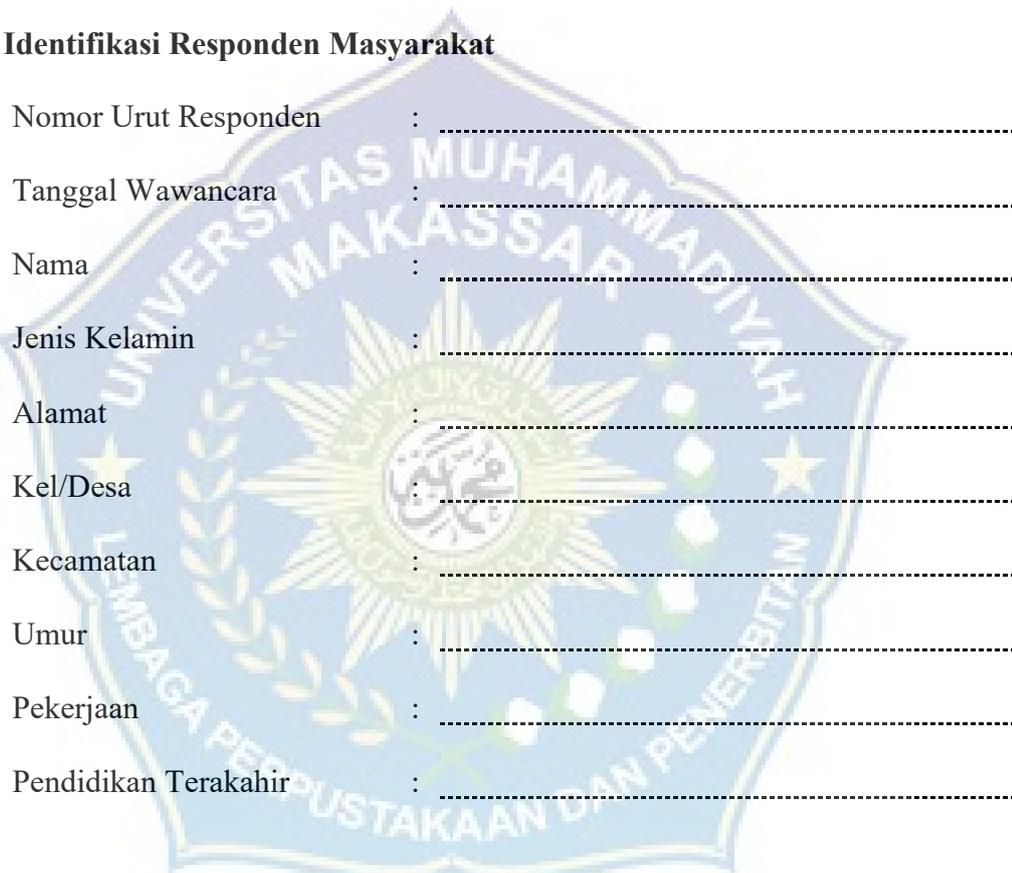


LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
PERSEPSI MASYARAKAT KUPS SIPATUO II TERHADAP
PERHUTANAN SOSIAL DI DESA MATTIROTASI KECAMATAN
WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

1. Identifikasi Responden Masyarakat



Nomor Urut Responden :

Tanggal Wawancara :

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Kel/Desa :

Kecamatan :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

2. Daftar Pertanyaan

I. Persepsi Masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat pada Program Perhutanan Sosial

No	Pertanyaan	Jawaban		
		SS/SM (3)	S/M (2)	TS/TM (1)
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu, saudara (i) tentang Pemasaran Komoditi pada Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?			
2.	Bagaimana pendapat bapak/ibu, saudara (i) tentang Fasilitas Bantuan Alat Ekonomi Produktif yang diberikan Program Perhutanan Sosial?			
3.	Bagaimana pendapat bapak/ibu, saudara (i) terkait Manfaat yang diberikan oleh program Hutan Kemasyarakatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan?			

II. Persepsi Masyarakat Tentang Keseimbangan Lingkungan pada Program Perhutanan Sosial

No	Pertanyaan	Jawaban		
		SS/SM (3)	S/M (2)	TS/TM (1)
1.	Menurut bapak/ibu, saudara (i) apakah dampak program hutan kemasyarakatan dalam membantu menjaga kelestarian hutan pada kawasan yang dikelola?			
2.	Menurut bapak/ibu, saudara (i), apakah program ini memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam?			
3.	Menurut bapak/ibu, saudara (i), dengan adanya program hutan kemasyarakatan Kups Sipatuo II dapat meningkatkan produktivitas lahan hutan?			

III. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Program Perhutanan Sosial

No	Pertanyaan	Jawaban		
		SS/SM (3)	S/M (2)	TS/TM (1)
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu, saudara (i) terhadap Program PS dalam membantu mengatasi konflik antara masyarakat dan pemerintah?			
2.	Bagaimana pendapat bapak/ibu, saudara (i) terhadap Hak ijin kelola selama 35 Tahun di Hutan Kemasyarakatan membantu lingkungan lestari pada masyarakat?			
3.	Apakah bapak/ibu, saudara (i) mengerti dengan jelas tentang sosialisasi yang diberikan dan pengaruh pada anggota KUPS Sipatuo II?			



Lampiran 2. Hasil Olah Data Skala Likert

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL SIPATUO II												
NO RES	KUESIONER TENTANG KESEJAHTERAAN EKONOMI			TOT P1	KUESIONER TENTANG ASPEK EKOLOGI			TOT P2	KUESIONER TENTANG SOSIAL BUDAYA			TOT P3
	I	II	III		I	II	III		I	II	III	
1	3	3	2	8	2	3	2	7	2	3	2	7
2	3	3	3	9	2	2	2	6	1	3	2	6
3	3	3	2	8	2	2	2	6	2	3	3	8
4	2	2	2	6	3	2	2	7	1	2	2	5
5	3	3	2	8	3	2	3	8	1	3	3	7
6	3	3	3	9	2	3	2	7	2	3	2	7
7	3	3	2	8	2	2	2	6	1	3	3	7
8	3	3	3	9	3	3	2	8	2	3	2	7
9	3	3	2	8	3	3	3	9	2	3	3	8
10	2	2	2	6	2	2	2	6	3	2	2	7
11	2	2	2	6	2	2	2	6	2	3	2	7
12	2	2	2	6	2	2	2	6	3	2	2	7
13	3	3	3	9	3	2	2	7	2	3	3	8
14	3	3	2	8	3	2	2	7	2	3	3	8
15	2	2	2	6	1	3	2	6	2	2	2	6
16	3	2	2	7	2	2	2	6	1	3	2	6
17	2	2	2	6	2	3	2	7	2	3	3	8
18	3	3	3	9	3	3	3	9	2	3	2	7
19	2	3	2	7	3	2	3	8	2	3	3	8
20	3	3	2	8	3	2	3	8	2	3	3	8
21	3	3	3	9	3	2	2	7	2	3	3	8
22	3	3	3	9	3	2	2	7	2	3	2	7
23	3	3	2	8	2	2	2	6	2	3	2	7
24	3	3	3	9	2	2	2	6	2	3	3	8
25	3	2	2	7	3	3	3	9	2	3	2	7
26	3	2	2	7	2	3	2	7	2	2	2	6
27	3	3	2	8	2	2	2	6	2	3	2	7

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL SIPATUO II

NO RES	KUESIONER TENTANG KESEJAHTERAAN EKONOMI			TOT P1	KUESIONER TENTANG ASPEK EKOLOGI			TOT P2	KUESIONER TENTANG SOSIAL BUDAYA			TOT P3
	I	II	III		I	II	III		I	II	III	
28	3	3	3	9	2	2	2	6	2	3	2	7
29	3	3	2	8	2	3	3	8	2	3	2	7
30	3	3	3	9	3	2	3	8	3	3	3	9
31	3	3	2	8	2	3	3	8	2	3	3	8
32	3	2	2	7	2	2	3	7	2	3	2	7
33	3	2	2	7	3	3	2	8	2	3	2	7
34	3	3	3	9	2	2	3	7	2	3	3	8
35	3	3	2	8	3	2	2	7	3	3	3	9
TOTAL	98	94	81	273	84	82	81	247	69	100	85	254
RATA	2,80	2,69	2,31	7,80	2,40	2,34	2,31	7,06	1,97	2,86	2,43	7,26



**Lampiran 3. Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan Kepada KTH Sipatuo II Desa Mattirotasi
Kecamatan WATANG PULUpulu Kabupaten Sidrap**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 337 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN "SIPATUO II" DESA MATTIROTASI
KECAMATAN WATTANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kelompok Tani Hutan SIPATUO II Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan SIPATUO II Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Konservasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010 tentang Hutan Kemasyarakatan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.07/V-Set/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.679/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.130 Hektar di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada :
- Nama Kelompok Tani Hutan : SIPATUO II
 Alamat : Desa Mattirotasi
 Kecamatan : Kecamatan Watang Pulu
 Luas Lahan Garapan : 49,25 Ha.
 Jumlah Anggota : 35 Orang
 dengan nama-nama Anggota dan luas lahan garapan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Areal Kerja Hutan yang diizinkan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan ini diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan diperpanjang sesuai dengan evaluasi selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berhak :
- a. Mendapatkan Fasilitas;
 - b. Memanfaatkan hasil hutan non kayu;
 - c. Memanfaatkan jasa lingkungan;
 - d. Memanfaatkan kawasan; dan
 - e. Memungut hasil hutan kayu;
- KELIMA** : Kelompok Tani Hutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini wajib :
- a. Melakukan penataan areal kerja;
 - b. Menyusun Rencana Kerja;
 - c. Melakukan Penanaman, Pemeliharaan, dan Pengamanan;
 - d. Membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; dan
 - e. Melaporkan kegiatan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Bupati Sidenreng Rappang;

- KEENAM : IUPHKm sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bukan merupakan Hak Kepemilikan atas Lahan Hutan.
- KETUJUH : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan, diagunkan atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 20 November 2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Social Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Balai Pengelolaan DAS Jeneberang WalanaE di Makassar;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
7. Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
8. Peringgal.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**NOMOR : 337 Tahun 2012****TANGGAL : 20 November 2012****DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN****" SIPATUO II "****DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATANG PULU**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelompok	Pekerjaan	KET./Luas(Ha)
1	JUMARDI	KETUA	Tani	2.00
2	LA GATO	SEKRETARIS	Tani	2.00
3	LA BEDDU B.	BENDAHARA	Tani	2.00
4	LA CONDING	ANGGOTA	Tani	1.50
5	RUSLI	ANGGOTA	Tani	1.00
6	LANOHONG	ANGGOTA	Tani	1.00
7	ABD. RAHMAN	ANGGOTA	Tani	1.50
8	ARAPAE	ANGGOTA	Tani	1.50
9	IRWAN	ANGGOTA	Tani	1.00
10	SUARDI	ANGGOTA	Tani	2.00
11	LANIA	ANGGOTA	Tani	1.50
12	LA TAHANG	ANGGOTA	Tani	1.00
13	HASNAWATI	ANGGOTA	Tani	2.00
14	LA KANDACONG	ANGGOTA	Tani	1.00
15	AZIS	ANGGOTA	Tani	1.00
16	LARAMANG	ANGGOTA	Tani	1.00
17	ALI MARE	ANGGOTA	Tani	1.00
18	ALIMUDDIN	ANGGOTA	Tani	1.50
19	MUH. AMIN	ANGGOTA	Tani	1.50
20	MUH. ALI KES	ANGGOTA	Tani	1.50
21	ARWAN	ANGGOTA	Tani	1.00
22	Hj.SITI AMANG	ANGGOTA	Tani	0.75
23	LA JUMA	ANGGOTA	Tani	2.00
24	I SAGENA	ANGGOTA	Tani	2.00
25	NURZAKIA	ANGGOTA	Tani	2.50
26	INGADE	ANGGOTA	Tani	1.00
27	ABD. RAHMAN	ANGGOTA	Tani	1.00
28	RUSDIYAMSAH	ANGGOTA	Tani	1.00
29	LA MANI	ANGGOTA	Tani	1.00
30	REZKY	ANGGOTA	Tani	1.00
31	I WELA	ANGGOTA	Tani	1.00
32	ABD. HAMID	ANGGOTA	Tani	1.50
33	AHMAD	ANGGOTA	Tani	1.50
34	MUSLIMIN	ANGGOTA	Tani	1.50
35	IBANI	ANGGOTA	Tani	2.00
TOTAL				49.25

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 337 Tahun 2012

TANGGAL : 20 November 2012

**SKETSA AREAL KERJA KELOMPOK TANI HUTAN
" SIPATUO II "**

DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATANG PULU



BUPATI SIDENRENG RAPPANG



**Lampiran 4. Surat Keputusan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
Kelompok Tani Hutan Sipatuo II Desa Mattirotasi
Kecamatan WATANG PULU Pulu**



KABUPATEN SIDRAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTIROTASI

NOMOR : 08 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
KELOMPOK TANI HUTAN SIPATUO II
DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATANG PULU**

KEPALA DESA MATTIROTASI,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Jo. P.9/PSKL/SET/PSL.2/8/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dimana bahwa Penetapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) salah satunya adalah oleh Kepala Desa.
 - Bahwa untuk kemajuan kegiatan pembangunan usaha perhutanan di Desa Mattirotasi dalam rangka mendukung Hutan Kemasyarakatan dipandang perlu segera mengangkat dan menunjuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Kelompok Tani Hutan Sipatuo II;
 - Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Mattirotasi.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Kehutanan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomere 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
 - Keputusan Bupati Sidrap Nomor 177 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Pada Kelompok Tani Hutan Sipatuo II Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
 - Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral PSKL No. P.9/ PSKL/SET/PSL.2/8/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTIROTASI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) KELOMPOK TANI HUTAN SIPATUO II
- KESATU :** Menetapkan/mengakui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Kelompok Tani Hutan Sipatuo II Desa Mattirotasi. Jenis usaha yakni Silfovasture (Jambu Mete, Jati dan Sapi)

Scanned by CamScanner

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mattirotasi
Pada Tanggal : 22 Februari 2018

KEPALA DESA MATTIROTASI



Ors. Zainuddin Makkarennu



Scanned by CamScanner

Lampiran 5 Dokumentasi Pengisian Kuesioner dan Wawancara Anggota KUPS Sipatuo II



Lampiran 6 Dokumentasi Kawasan Hutan Masyarakat Yang di Kelola KUPS Sipatuo II



Lampiran 7 Dokumentasi Hasil Olahan Produk KUPS Sipatuo II





11:37:54 · 2024/08/25
Jalan Poros Pare-Pare
Kabupaten Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan
Indonesia



11:37:48 · 2024/08/25
Jalan Poros Pare-Pare
Kabupaten Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan
Indonesia



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Achmad Rizal
Nim : 105951101520
Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursi Hafidza, NPM. 1111011111
NEM. 964

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Achmad Rizal 105951101520

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repo-dosen.ulm.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.unja.ac.id

Internet Source

3%

3

Immanuel Carter Aldo Hombokau, Johnny S. Tasirin, Hengki D. Walangitan. "Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2023

Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



AB II Achmad Rizal 105951101520

ORIGINALITY

22%



20%

9%

10%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sipn.menpan.go.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
3	Erlangga Galih Zulva Nugroho, Afdhal Afdhal, Abdurrahman Abdurrahman, Berwi Fazri Pamudi, Ria Purnawian Sulistiani. "Persepsi Masyarakat tentang Program Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Provinsi Aceh", Malahayati Nursing Journal, 2022 Publication	3%
4	belantara.unram.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	2%
6	text-id.123dok.com Internet Source	2%
7	makalahmatakuliahprodimpi21.blogspot.com Internet Source	2%

AB III Achmad Rizal 105951101520

ORIGINALITY REPORT

8%



SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	3%
2	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	www.dmi-journals.org Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

AB IV Achmad Rizal 105951101520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1

ppjp.ulm.ac.id
Internet Source

2%

2

journal.unhas.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



Dipindai dengan
CamScanner

AB V Achmad Rizal 105951101520

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX



0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Dipindai dengan
CamScanner

RIWAYAT HIDUP



Achmad Rizal lahir di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, pada tanggal 27 September 2002. Penulis merupakan putra pertama dari Bapak Suparman Djide dan Ibu Iriani. Pada tahun 2008 penulis masuk Sekolah Dasar di SD Integral Hidayatullah Timika di Kabupaten Mimika dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Integral Hidayatullah Timika dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis kembali menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN6 Mimika dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kembali melanjutkan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Makassar, yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian dan lulus di tahun 2024.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Persepsi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Terhadap Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap”.